

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK ABK DI SURABAYA

Ika Devy Pramudiana
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Ik.pramudiana@gmail.com

Abstract

Education is one of important aspect of human life. A good education will produce smart and competent nation's next generation. Education is a human right, with no exception for children with disabilities (difable). Schools as environment have an important role need supports from all parties. Role of Parents, school special, expert, high school, SLB, and the government is still rated low. The school as a means and infrastructure is still limited. Involvement of parents as one of key to the success of inclusive education should be built well. Unfortunately, there are still some obstacle ad practical depreciation and conditions, infrastructure, and the financial conditions.

Key words: inclusive education, disable students, policy

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten dalam bidangnya. Setiap Negara memberikan kebijakan yang terbaik untuk masyarakatnya mendapatkan pendidikan.

Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia diperlukan sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan zaman. Perbaikan itu dilakukan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menggunakan sistem pendidikan dan pola kebijakan yang sesuai dengan keadaan Indonesia. Pengakuan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara, juga diperkuat dalam berbagai deklarasi internasional. Pada tahun 1948, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang

Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004).

Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara tidak terkecuali pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus seperti dijelaskan diatas dan juga pada Definisi pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan akses pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (penyandang kelainan dan kelompok anak kurang beruntung lainnya). Anak penyandang kelainan sementara ini mendapat pendidikan secara segregatif di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Dikarenakan jumlah

SLB yang sangat terbatas dibandingkan dengan populasi anak penyandang kelainan dan lokasi SLB yang biasanya di perkotaan mengakibatkan anak penyandang kelainan, terutama yang di daerah pinggiran dan pedesaan, belum memperoleh layanan pendidikan formal secara memadai.

Meskipun ada beberapa undang-undang yang mengatur pendidikan inklusif tetapi banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang berusia sekolah masih sangat sedikit yang menikmati layanan pendidikan. Dari perkiraan jumlah siswa berkebutuhan khusus atau siswa inklusi di Surabaya jumlahnya meningkat tahun ini. Jumlah peserta didik inklusi 2014 sebesar 4.426 orang, dan tahun ini menjadi 8.106 orang yang berkebutuhan khusus dan memerlukan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi anak berkebutuhan khusus di Surabaya hanya sebagian saja yang mendapatkan fasilitas sekolah inklusi tersebut. Ini disebabkan karena masih ada anak-anak dengan hambatan atau kecacatan yang tidak terlayani pendidikannya karena kurangnya pemahaman orang tua. Realitanya sebagian besar masyarakat merasa malu mempunyai anak cacat atau anak yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata, sehingga mereka berupaya menyembunyikan anaknya. Dengan demikian anak tersebut tidak dapat menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Selain itu jumlah tenaga didik ABK juga terbatas yang tidak bisa mengimbangi naiknya jumlah siswa ABK, Idealnya 1 guru pendamping siswa inklusi atau ABK maksimal mendampingi empat siswa. Namun karena kurangnya jumlah guru dengan disiplin penanganan ABK.

Selain itu penyebab lainnya masih terbatasnya jumlah sekolah pendidikan inklusi dan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa/regular. Selain itu pada umumnya lokasi SLB berada di ibu kota kabupaten/kota, padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa), tidak hanya di ibu kota kabupaten saja.

Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di sekolah terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah.

Berdasarkan fenomena di atas, masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kondisi ini disebabkan adanya berbagai hambatan termasuk didalamnya kondisi sosial dari masyarakat. Hambatan lainnya datang dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal. Sehingga penyelenggara pendidikan inklusif ini sampai sekarang belum berkembang baik. Padahal menurut Foreman (2002) sekolah inklusif harus menyediakan semua kebutuhan siswa, apapun tingkat kebutuhan dan keadaan siswa tersebut. Dari penjelasan di atas maka diketahui kebijakan sekolah inklusi belum mengena kepada ABK karena beberapa hal, Agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan implementasi kebijakan inklusif, oleh karena itu sangat dibutuhkan para implementor yang mempunyai komitmen tinggi, mau dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Surabaya?
- b. Apa saja kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam mewujudkan mutu pendidikan di Surabaya?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7)

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan ini, bukan termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab

masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terdapat tahap-tahap kebijakan publik. Berikut tahapan atau proses Kebijakan Publik Menurut William Dunn:



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik Menurut William Dunn

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijaksanaan sebagai *a projecterd program of goals, values and practice* yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

William Dunn memahami analisis kebijakan sebagai suatu proses ilmu penelitian. Dalam hal ini menganalisis suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan. Informasi ini oleh analis kemudian digunakan unluk membuat informasi tentang alternatifalternatif kebijakan. Begitu seterusnya, sehingga aktivitas ini merupakan suatu siklus. Sedangkan siklus kebijakaan menurut Dunn adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus Kebijakan William Dunn

Dalam gambar 2 informasi kebijakan termuat di dalam kotak, sedang metode yang digunakan untuk mengubah informasi itu menjadi informasi jenis hari temuat di dalam bentuk lonjong. Aktivitas menganalisis kebijakan pada pokoknya menerapkan metode-metode perubahan informasi kebijaksanaan tersebut. Berdasarkan uraian-uraian diatas mempunyai satu arti, bahwa semua kebijakan pasti mengandung suatu unsur pengawasan. Teknik pengawasan kebijakan-kebijaksanaan tersebut benar-benar diimplementasikan sehingga kebijakan tersebut benar-benar dapat dioperasionalkan.

Implementasi kebijakan

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Chief J.O.Udoji menyatakan bahwa: “pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip”. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.

- Tahap Implementasi Kebijakan

Dengan pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approaches) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut:

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas

dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;

2. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. Hal yang demikian menurut Andrew Dunsire: “karena adanya implementasi gap (kesenjangan implementasi), yaitu suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (implementation capacity)”. Dengan Implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncanakan. Namun demikian kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut. Ragam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut peneliti tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga

menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan publik menjadi efektif, bilamana dilaksanakan dan mempunyai dampak baik diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya.

Pendidikan Inklusi

Pengertian Pendidikan Inklusi Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007:82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. (Lay Kekeh Mar than, 2007:145)

Menurut Staub dan Peck (Tarmansyah, 2007:83), pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. Dari beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan

inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK).

Tujuan Pendidikan Inklusif Secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 1). Oleh sebab itu intidari pendidikan inklusi adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua dan oleh masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi antara lain adalah:

- 1) Berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya.
- 2) Anak dapat belajar secara mandiri, dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah dan masyarakat.
- 4) Anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan, dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut.

Model Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Menurut Suyanto & Mudjito A.K. (20012: 5), ada tiga model pendidikan untuk menggabungkan anak berkebutuhan

khusus dengan anak normal dalam satu lingkungan belajar, yakni:

- a. *Mainstream*, adalah system pendidikan yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Diikuti oleh anak-anak yang sakit namun tidak berdampak pada kemampuan kognisinya.
- b. *Integrasi*, adalah menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kelas anak-anak normal, dimana mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Sedangkan untuk mata pelajaran akademis lainnya anak-anak berkebutuhan khusus itu memperoleh pengganti di kelas yang berbeda dan terpisah. Penempatan integrasi itu tidak sama dengan integrasi pengajaran dan itegrasi sosial, karena tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah.
- c. *Inklusi*, adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009).

Karakteristik Pendidikan Inklusi, Karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Hubungan Ramah dan hangat, contoh untuk anak tuna rungu: guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas(orang tua) memuji anak tuna rungu dan membantu lainnya.
- b) Kemampuan Guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping.
- c) Pengaturan tempat duduk, Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti, duduk berkelompok di lantai

membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain.

- d) Materi belajar Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran, contoh pembelajarn matematika disampaikan melalui kegiatanyang lebih menarik, menantang dan menyenangkan melalui bermainperan menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa.
- e) Sumber Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak, contoh meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu.
- f) Evaluasi Penilaian, observasi, portofolio yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai (Lay Kekeh Marthan, 2007:152).

Dalam pendidikan inklusi terdapat siswa normal dan berkebutuhan khusus, dalam rangka untuk menciptakan manusia yang berkembang seutuhnya maka diperlukan adanya pembinaan peserta didik, melalui pembinaan ini maka diharapkan peserta didik mampu berkembang dan memiliki keterampilan secara optimal.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan pelayanan publik berkait yang diberikan kepada para penyandang cacat baik pelayanan fisik maupun non-fisik. dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan sekolah Inklusif untuk ABK di Surabaya. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan.

Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka baru dilakukan penafsiran data (Moleong, 1990). Sehingga tahap-tahap dalam analisa data kualitatif meliputi: pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data.

Terakhir, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu melalui tiga tahapan pengecekan: Pertama, triangulasi sumber data, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan data hasil observasi dan survei. Kedua, melakukan peer review untuk mengetahui pendapat para peneliti dan pakar lain yang melakukan penelitian serupa. Ketiga, peneliti akan melakukan triangulasi teori, yaitu membandingkan data empiris dengan kajian teoritis yang telah berkembang dan diakui kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang

Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pernyataan tersebut di atas telah menunjukkan kesungguhan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di Indonesia yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman teknis serta serangkaian kegiatan yang dapat mendukung implementasi pendidikan inklusif.

Kota Surabaya saat ini telah menunjuk total 262 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, terdiri dari 168 Sekolah Dasar, 90 Sekolah Menengah Pertama, 2 Sekolah Menengah Atas, dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan, yang tersebar di seluruh Kota Surabaya. Jumlah sekolah inklusif pada jenjang SMA dan SMK sangat kecil dibandingkan dengan jumlah SD dan SMP yang menerapkan pendidikan inklusif, namun apabila dibandingkan dengan jumlah total sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya, jumlah sekolah yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibilang masih belum terlalu maksimal, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah ABK di Surabaya

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Sekolah yang diunjuk sebagai sekolah Inklusif	Persentase
1	SD/MI	358	168	49,76%
2	SMP/ MTS	367	90	24,87%
3	SMA/ MA/ SMK	106	4	3,98%
	TOTAL	81	262	31,62%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2015

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa apabila dibandingkan dengan jumlah total sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya sebanyak 831 lembaga, jumlah sekolah yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibilang masih belum terlalu maksimal. Hampir di semua jenjang pendidikan, jumlah sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif belum mencapai 50%. Sebaran sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari segi wilayah juga belum optimal, di mana belum semua Kecamatan

memiliki sekolah inklusif dengan jenjang pendidikan tertentu.

Sekolah sebagai lingkungan yang sangat berperan terhadap perubahan pada siswa ABK membutuhkan dukungan dari semua pihak. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, SLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Fasilitas sekolah seperti sarana dan prasarana juga masih terbatas. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya orang tua sering bersikap kurang peduli

terhadap anaknya. Beberapa kecenderungan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya antara lain adanya protes terhadap kenaikan kelas ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas, tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, dan saling berbagai. Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman. Sekolah juga harus mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua, sekalipun hal tersebut diakui menambah beban tambahan, namun diterima oleh sekolah sebagai tantangan.

Aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang baik dan profesional merupakan patokan agar implementasi pendidikan inklusif dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan semua kalangan. Sumber daya tersebut seharusnya lebih diperhatikan oleh sekolah maupun Pemerintah. Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi, aspek struktur birokrasi juga merupakan salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Surabaya melibatkan cukup banyak pihak, sehingga kejelasan tugas dan pembagian tanggung jawab menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan.

Selain implementasi kebijakan ada pula Kendala Pendidikan Inklusif di Surabaya, Kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada berbagai macam, diantaranya yaitu kendala-kendala yang sifatnya praktis sebagai contoh kondisi geografis, sarana-prasarana, dan kondisi keuangan. Psikologi baik dari

masyarakat maupun guru juga merupakan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, salah satunya penilaian/persepsi negatif masyarakat terhadap ABK. Power atau kekuasaan dari penguasa juga merupakan hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, misalnya penguasa membuat kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa. Minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusif, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusif serta keberadaan guru pendamping khusus yang berkompeten di bidangnya menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusif belum benar-benar dipersiapkan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jalannya implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Surabaya, Sekolah sebagai lingkungan yang sangat berperan terhadap perubahan pada siswa ABK membutuhkan dukungan dari semua pihak. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, SLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Fasilitas sekolah seperti sarana dan prasarana juga masih terbatas. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya orang tua sering bersikap kurang peduli terhadap anaknya. Beberapa kecenderungan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya antara lain adanya protes terhadap kenaikan kelas ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas, tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, dan saling berbagai. Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman. Sekolah juga harus mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan

orang tua, sekalipun hal tersebut diakui menambah beban tambahan, namun diterima oleh sekolah sebagai tantangan. Sedangkan Kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada berbagai macam, diantaranya yaitu kendala-kendala yang sifatnya praktis sebagai contoh kondisi geografis, sarana-prasarana, dan kondisi keuangan. Psikologi baik dari masyarakat maupun guru juga merupakan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, salah satunya penilaian/persepsi negatif masyarakat terhadap ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Abdullah, 1988. Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Dunn, N. William, Muhadjir Darwin (Penyunting), 2001. Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah, Yogyakarta: Hanindita.
- , 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Milles & Huberman. 1992, Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru), Jakarta: UI-Press.
- Sunardi. 1995. Kecenderungan Dalam pendidikan Luar biasa. Dikti. Depdikbud. Jakarta.
- Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit AIPI Bandung, Puslit KP2W Lemlit Unpad.